



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 208 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL VALIDASI UTANG KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2016-2021 OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, SERTA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil validasi utang kegiatan fisik Tahun Anggaran 2016-2021 oleh Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo merupakan kewajiban yang perlu diselesaikan dan telah di validasi serta merupakan hutang Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Di Provinsi Papua Dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Apip (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Piagam Audit Intern (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 25).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Validasi utang Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2016-2021 Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Validasi utang kegiatan fisik tahun anggaran 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas, akan segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 5 September 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
 Nomor : 208 Tahun 2022
 Tanggal : 5 September 2022

HASIL VALIDASI UTANG KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2016-2021 OLEH APARAT PENGAWAS INTERN
 PEMERINTAH (APIP) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, SEKRETARIAT DAERAH,
 SEKRETARIAT DPRD, SERTA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO

NO	ORGANISASI	KEGIATAN	SUMBER DANA	NILAI KONTRAK/ NOMOR KONTRAK	REALISASI (Rp)	HASIL VALIDASI (Rp)	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	PEMBANGUNAN KANTOR DISTRIK SURU-SURU	DBH PUSAT	2.050.500.000,- 011/326/KONT-PKDSur/SET-YHK/2019 Tanggal 09 Juli 2019	615.150.000,-	1.435.350.000,-	PT. LEMPO BALIEM BERKAT
2	SEKTERARIAT DPRD	1. PENIMBUNAN HALAMAN KANTOR DPRD TAHAP I TA 2020	DAU	1.496.850.000,- 175/08/KONT/KEG-PAH-DPRDTA.I/SETWAN/YHK/2020 Tanggal 18 Maret 2020	898.110.000,-	598.740.000,-	CV. ENARO DUA SATU
		2. PENIMBUNAN HALAMAN KANTOR DPRD TAHAP II TA 2021	DAU	5.757.830.000,- 640/05/KONT/KEG-PAHK-DPRD/SETW/YHK2021 Tanggal 14 Juli 2021		5.757.830.000,-	PT. ANABIK KARYA PAPUA
3	DINAS PENDIDIKAN	1. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SD INPRES YERIKO	DAK	1.092.704.205,- 484.3/483/KONT/KEGRKBSD YER/DIPEND/YHK/2019 Tanggal 02 Juli 2019	764.892.537,-	327.811.668,-	PT. IBA TOLINERI
		2. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SD NEGERI OKLAMA	DAK	1.083.000.000,- 484.3/479/KONT/KEGRKBSD OKL/DIPEND/YHK/2019 Tanggal 02 Juli 2019	758.100.000,-	324.900.000,-	PT. IBA TOLINERI

		3. REHABILITASI BERAT RUANG KELAS + MEUBELER SD INPRES PINIPINTOK	DAK	765.717.100,- 484.3/481/KONT/KEGRKB/S DPIN/DIPEND/YHK/2019 Tanggal 02 Juli 2019	536.001.970,-	229.715.130,-	CV. YIWU ABADI
		4. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SD INPRES TIBUL	DAK	756.217.100,- 484.3/488/KONT/KEGRKGS DIPEND/YHK/2019 Tanggal 02 Juli 2019	535.651.970,-	220.565.130,-	CV. YIWU ABADI
		5. REHABILITASI BERAT RUANG KELAS + MEUBELER SD YPK WALLEY	DAK	765.717.100,- 484.3/46/KONT/KEGRKBS DIPEND/YHK/2019 Tanggal 02 Juli 2019	536.001.970,-	229.715.130,-	CV. YIWU ABADI
		6. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU NEGERI UBAHAK	DAK	375.268.240,- 484.3/470/KONT/KEGRDGS PUBA/DIPEND/YHK/ 2019 Tanggal 02 Juli 2019	262.687.768,-	112.580.472,-	CV. YIWU ABADI
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN		1.021.684.000,- 600/02/KONT-PMJ/DPU- YHK/2016 Tanggal 30 Mei 2016	510.842.000,-	510.842.000,-	CV. MARUNDA JAYA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

